

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Informasi Akuntansi

2.1.1 Pengertian

Informasi merupakan data yang telah diolah dan ditata sedemikian rupa sehingga menghasilkan sesuatu yang bermakna dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan (Romney & Paul John Steinbart, 2018). Untuk menghasilkan sebuah informasi yang berkualitas yang dapat mendukung organisasi, diperlukan sebuah sistem yang baik. Sistem tersebut harus terdesain untuk dapat mengakomodasi tujuan organisasi.

Menurut Mulyadi (2016), sistem adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Setiap perusahaan pasti memiliki berbagai macam sistem pada setiap proses bisnisnya. Salah satu sistem yang penting bagi hampir semua organisasi adalah mengenai sistem akuntansi.

Akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang mengidentifikasi, merekam, dan mengomunikasikan aktivitas ekonomi dari sebuah organisasi kepada pengguna yang berkepentingan (Kieso et al., 2015). Dari definisi tersebut,

dapat diketahui bahwa akuntansi tidak dapat terlepas dari sebuah sistem dan informasi. Ketiganya merupakan sebuah entitas yang tidak dapat terpisahkan.

Secara garis besar, sistem informasi akuntansi merupakan sistem yang mengumpulkan, merekam, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi untuk pengambilan keputusan (Romney & Steinbart, 2018).

2.1.2 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Mulyadi (2016), tujuan pengembangan sistem akuntansi adalah:

1. Untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan usaha baru
2. Untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada
3. Untuk memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern
4. Untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi

2.1.3 Komponen Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi terdiri dari enam komponen (Romney & Steinbart, 2018) :

1. Orang yang menggunakan sistem
2. Prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data
3. Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnis
4. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data
5. Infrastruktur teknologi informasi, termasuk komputer, perangkat *peripheral*, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam sistem informasi akuntansi

6. Pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menjaga data sistem informasi akuntansi

Keenam komponen tersebut memungkinkan sistem informasi akuntansi untuk memenuhi tiga fungsi bisnis yang penting, yaitu:

1. Mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas organisasi, sumber daya, dan personel.
2. Mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat mengambil keputusan seperti merencanakan, melaksanakan, mengontrol, mengevaluasi aktivitas, sumber daya dan personel.
3. Menyediakan kontrol yang cukup untuk menjaga aset dan data organisasi.

2.1.4 Manfaat Sistem Informasi Akuntansi

Ketika sistem informasi akuntansi didesain dengan baik, hal tersebut akan meningkatkan *value* organisasi berupa (Romney & Steinbart, 2018):

1. Meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya jasa dan produksi
2. Meningkatkan efisiensi
3. Berbagi pengetahuan
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasok
5. Meningkatkan struktur *internal control*
6. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan

2.2 Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah

Sistem informasi akuntansi pemerintah merupakan sistem informasi akuntansi yang digunakan di instansi pemerintahan. Hal tersebut sama dengan definisi sistem informasi akuntansi yang ada.

Secara umum, konsepsi dari sistem informasi akuntansi pemerintah adalah kumpulan dari peralatan dan manusia yang berada di organisasi pemerintah untuk melakukan pengolahan data berupa pengumpulan, pencatatan, penyimpanan, dan pengolahan peristiwa dan data keuangan pemerintah untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan.

Sistem informasi akuntansi berperan penting bagi pemerintahan. Kualitas laporan keuangan daerah meningkat ketika sistem informasi akuntansi dimanfaatkan dalam organisasi (Untary et al.). SIPKD (sistem informasi pengelolaan keuangan daerah) juga berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan (Ayu et al., 2014).

Penerapan sistem informasi akuntansi di Indonesia sudah dijalankan di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Keduanya mempunyai sistem tersendiri dikarenakan penerapan otonomi daerah.

Pada tingkat pemerintah pusat telah dikembangkan *Integrated Financial Management Information System (IFMIS)*. Tujuan pembentukannya adalah pengelolaan keuangan negara secara komprehensif. Hal tersebut mencakup *budgeting*, *treasury*, dan aplikasi pendukung lainnya atau *others* (Sudarto, 2019). Hal ini diimplementasikan dengan pembuatan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) sebagai fungsi *treasury* dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sebagai fungsi *budgeting* dan *others*.

Sistem informasi akuntansi mengenai fungsi-fungsi pengelolaan keuangan negara pada tingkat daerah juga telah dikembangkan. Sampai sekarang, tiap daerah memiliki sistem dan dengan istilah masing-masing. Misalnya untuk

pengelolaan keuangan daerah menggunakan SIPKD (Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah), untuk penganggaran menggunakan SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah), untuk pengelolaan aset menggunakan SIMBADA (sistem Informasi Manajemen Barang Daerah). Namun ke depannya berdasarkan keterangan narasumber di BPKAD Kota Blitar, semua sistem tersebut akan disamakan pada semua daerah di bawah bimbingan dan koordinasi Kemendagri.

2.3 Sistem Pengendalian Internal

2.3.1 Pengertian

Pengendalian internal merupakan proses dan prosedur yang diimplementasikan untuk menyediakan keyakinan yang memadai bahwa tujuan pengendalian telah terpenuhi (Romney & Steinbart, 2018).

Menurut Mulyadi (2016) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Sedangkan berdasarkan COSO (dalam *Accounting Information System* 11e Gelinas et al., n.d.) pengendalian internal adalah:

Internal control is a process-effected by an entity's board of directors, management, and other personnel-designed to provide reasonable assurance regarding the achievement of objectives in the effectiveness and efficiency of operations, reliability of reporting, and compliance with applicable laws and regulations.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan sebuah proses yang dilaksanakan oleh organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan keyakinan yang memadai.

Menurut Suprayitno (dalam Yogasworo & Suprayitno, 2020), definisi SPI yang diterima secara luas antara lain berasal dari COSO, CobiT, INTOSAI, dan USA SEC. COSO menerbitkan *Internal Control Integrated Framework (ICIF)* untuk menjadi panduan dalam mengevaluasi dan meningkatkan sistem pengendalian internal. Sedangkan CobiT lebih berfokus kepada pengendalian internal dari sisi teknologi informasi. Pemerintah juga telah mengadopsi SPI dengan menerbitkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang mengadopsi COSO ICIF.

COSO menerbitkan sebuah *internal control integrated framework* yang mendefinisikan pengendalian internal dan menyediakan panduan untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem pengendalian internal.

Komponen pengendalian internal yang dirancang oleh COSO terdiri dari:

1. *Control environment*

Komponen *control environment* merupakan fondasi bagi semua komponen pengendalian internal. Inti dari segala macam bisnis yang berjalan ada pada sumber daya manusia dan lingkungan di mana mereka bekerja dan berinteraksi. Keduanya merupakan mesin yang menjalankan organisasi.

2. *Risk assessments*

Sebuah organisasi harus mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risikonya. Proses manajemen risiko sangat dinamis, oleh karena itu manajemen harus memperhatikan perubahan pada lingkungan eksternal dan di antara bisnisnya yang mungkin menjadi penghalang untuk mencapai tujuannya.

3. *Control activities*

Kebijakan pengendalian dan prosedur dapat membantu manajemen untuk memastikan bahwa setiap aksi yang dilakukan telah menghindari risiko yang diperhatikan manajemen dan setiap aksi dapat mencapai tujuan organisasi. *Control activities* dilakukan pada semua level di antara proses bisnis yang ada dan menggunakan teknologi.

4. *Information and communication*

Sistem informasi dan komunikasi menangkap dan menukar informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengontrol operasi organisasi. Komunikasi harus terjadi secara internal maupun eksternal untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas pengendalian internal harian.

5. *Monitoring*

Semua proses harus diawasi dan modifikasi dapat dilakukan apabila kondisi memenuhi. Evaluasi dapat digunakan untuk meyakinkan apakah setiap komponen dari pengendalian internal tetap ada dan berjalan sesuai aturan.

2.3.2 Tujuan Pengendalian Internal

Menurut Romney dan Steinbart (2018) pengendalian internal memiliki tujuan untuk:

1. Menjaga aset-mencegah atau mendeteksi pembelian, penggunaan, dan pemusnahan yang tidak diotorisasi.
2. Menjaga catatan dengan detail yang cukup untuk melaporkan aset secara akurat dan *fair*

3. Menyajikan informasi yang akurat dan dapat diandalkan
4. Menyiapkan laporan keuangan dengan mengikuti kriteria yang telah ditentukan
5. Meningkatkan efisiensi operasional
6. Mendukung untuk taat kepada kebijakan manajerial yang telah dibuat
7. Patuh dengan hukum dan peraturan yang berlaku

2.3.3 Fungsi Pengendalian Internal

Pengendalian internal menjalankan tiga fungsi penting, menurut Romney dan Steinbart (2018) ketiga fungsi penting tersebut adalah:

1. *Preventive control* berfungsi untuk mencegah masalah sebelum masalah tersebut datang.
2. *Detective control* berfungsi untuk mengetahui masalah yang tidak dicegah.
3. *Corrective control* berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengoreksi sekaligus *me-recover* atas masalah yang terjadi.

2.3.4 Kategori Pengendalian Internal

Pengendalian sering dikategorikan menjadi dua (Romney & Steinbart, 2018), yaitu:

1. General controls

Pengendalian ini memastikan bahwa lingkungan pengendalian organisasi dikelola dengan baik dan berjalan dengan stabil. Misalnya keamanan secara umum, infrastruktur IT, akuisisi perangkat lunak, pengembangan, dan perawatan yang terkontrol.

2. Application controls

Pengendalian pada sisi aplikasi bertujuan untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki transaksi yang *error* dan *fraud* dalam program aplikasi itu sendiri. Pengendalian ini berfokus pada akurasi, kelengkapan, validitas, dan otorisasi dari data yang ditangkap, masukkan, diproses, disimpan, ditransfer ke sistem lain, dan yang dilaporkan.

2.4 Sistem Informasi Akuntansi Aset Tetap

2.4.1 Deskripsi Umum

2.4.1.1 Pengertian Aset Tetap dan BMD

Aset tetap adalah aset perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari satu tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali (Mulyadi, 2016). Karena aset tetap mempunyai wujud, aset tetap sering kali disebut dengan aset tetap berwujud (*tangible fixed assets*). Sedangkan menurut SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Dalam akuntansi pemerintahan, aset tetap merupakan bagian dari barang milik negara/ daerah. Dikutip dari PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/ BMD dan Perda Kota Blitar No. 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan BMD, pengertian dari BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2.4.1.2 Karakteristik

Karakteristik mengenai transaksi yang berkaitan dengan aset tetap menurut Mulyadi (2016) adalah:

1. Terjadinya transaksi yang mengubah aset tetap relatif sedikit namun nominal yang terlibat umumnya besar.
2. Pengendalian aset tetap dilaksanakan pada saat perencanaan perolehan aset tetap, sehingga sistem otorisasi perolehan aset tetap diterapkan pada saat pencatatan perolehan dan pada saat pelaksanaan rencana perolehan aset tetap.
3. Pengeluaran terhadap aset tetap perlu dibedakan menjadi pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*) dan pengeluaran modal (*capital expenditure*)

2.4.1.3 Perolehan

Aset tetap diperoleh melalui berbagai cara mulai dari pembelian, pembangunan atau sumbangan (Mulyadi, 2016). Pada pemerintah daerah, berdasarkan Perda Kota Blitar No. 2 Tahun 2019 aset tetap yang merupakan bagian dari BMD dapat diperoleh melalui:

1. Pembelian atas beban APBD
2. Hibah atau sejenis
3. Pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak
4. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan
5. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
6. Hasil divestasi

2.4.1.4 Penggolongan

Pada dasarnya, penggolongan aset tetap tergantung kebijakan perusahaan dan peraturan yang ada. Pada pemerintahan, berdasarkan SAP aset tetap digolongkan sebagai berikut:

1. Tanah
2. Peralatan dan mesin
3. Gedung dan bangunan
4. Jalan, irigasi, dan jaringan
5. Aset tetap lainnya
6. Konstruksi dalam pengerjaan

2.4.2 Dokumen Transaksi Aset Tetap

Menurut Mulyadi (2016), dokumen yang digunakan untuk merekam data transaksi berkaitan dengan aset tetap adalah:

1. Surat permintaan otorisasi investasi
2. Surat permintaan reparasi
3. Surat permintaan transfer aset tetap
4. Surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap
5. Surat perintah kerja
6. Laporan penerimaan barang
7. Faktur dari pemasok
8. Bukti kas keluar
9. Bukti memorial

2.4.3 Fungsi Terkait Aset Tetap

Menurut Mulyadi (2016), fungsi yang terkait dalam transaksi yang mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap adalah:

1. Fungsi pemakai

Fungsi pemakai bertanggung jawab untuk mengajukan usulan investasi aset tetap dan otorisasi untuk merealisasikannya sesuai yang tercantum dalam anggaran investasi yang telah disetujui pada RUPS.

2. Fungsi penelitian dan pengembangan

Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengkaji kelayakan setiap usul pengajuan aset tetap dan mengajukan usulan investasi aset tetap yang digunakan oleh lebih dari satu fungsi.

3. Direktur terkait

Pejabat ini berfungsi memberikan persetujuan terhadap usulan investasi dan surat permintaan otorisasi reparasi yang diajukan unit di bawah wewenangnya.

4. Direktur utama

Pejabat ini berfungsi memberikan semua otorisasi terhadap mutasi aset tetap.

5. Fungsi pembelian

Fungsi ini bertanggung jawab untuk memilih pemasok dan menerbitkan surat order pembelian untuk pengadaan

6. Fungsi penerimaan

Fungsi ini bertanggung jawab untuk memeriksa apakah aset tetap yang diterima dari pemasok telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta.

7. Fungsi aset tetap

Fungsi ini bertanggung jawab dalam pengelolaan aset tetap perusahaan. Fungsi ini dapat dan diberikan wewenang dalam penempatan, pemindahan, dan penghentian pemakaian aset tetap.

8. Fungsi akuntansi

Fungsi akuntansi bertanggung jawab dalam pembuatan dokumen sumber untuk mencatat mutasi aset tetap. Fungsi ini juga menyelenggarakan dan menatausahakan jurnal yang berkaitan dengan aset tetap.

Pembagian fungsi-fungsi yang terkait aset tetap menurut Mulyadi dengan versi Pemerintahan sedikit berbeda. Dari perspektif pemerintahan, terdapat struktur dan fungsi yang dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar II. 1 Struktur Pengelolaan BMN/ BMD



Sumber : Bahan Ajar SIAP Aset Tetap PKN STAN

Berdasarkan struktur organisasi di atas, presiden menyerahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara kepada Kepala Daerah. Dalam konteks ini, Kepala Daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD dibantu oleh:

1. Sekretaris Daerah selaku pengelola BMD

2. Kepala Perangkat Daerah pengelola keuangan daerah selaku pelaksana pengelolaan BMD
3. Kepala SKPD selaku pengguna BMD
4. Kepala tiap bidang selaku Kuasa Pengguna BMD
5. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
6. Pengurus Barang

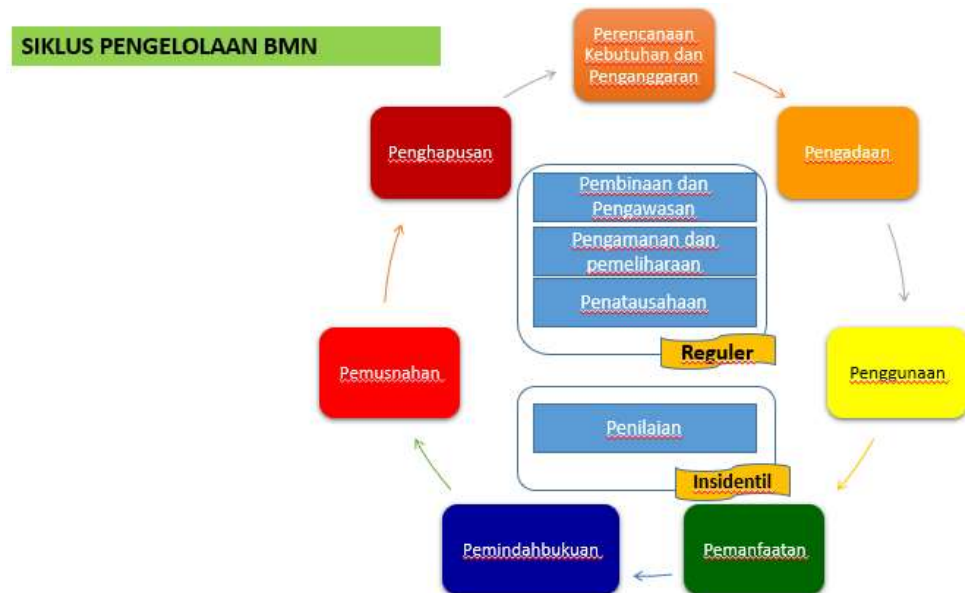
2.4.4 Jaringan Subsistem

Dikutip dari Mulyadi (2016), jaringan subsistem yang membentuk sistem aset tetap adalah:

1. Sistem pembelian
2. Sistem perolehan aset tetap melalui pembangunan sendiri
3. Sistem pengeluaran modal
4. Sistem penghentian pemakaian aset tetap
5. Sistem transfer aset tetap
6. Sistem revaluasi aset tetap
7. Sistem akuntansi penyusutan aset tetap

Dalam versi pemerintahan, jaringan subsistem yang membentuk sistem aset tetap tersebut ekuivalen dengan siklus dan lingkup pengelolaan yang terdapat dalam PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/ BMD maupun Perda Kota Blitar No. 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan BMD yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar II. 8 Siklus Pengelolaan BMN/ BMD



Sumber : Bahan Ajar SIAP Aset Tetap PKN STAN

Pada siklus tersebut, terdapat proses pengelolaan BMN/ BMD yang dapat diurutkan sebagai berikut:

1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran
2. Pengadaan
3. Penggunaan
4. Pemanfaatan
5. Pengamanan dan pemeliharaan
6. Penilaian
7. Pemindahtanganan
8. Pemusnahan
9. Penghapusan
10. Penatausahaan
11. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

2.4.5 Pengendalian Internal Aset Tetap

Menurut Mulyadi (Mulyadi, 2016), pengendalian internal aset tetap meliputi:

1. Organisasi

- a. Fungsi pemakai harus terpisah dari fungsi akuntansi aset tetap
- b. Transaksi perolehan, penjualan, dan penghentian pemakaian aset tetap harus dilaksanakan oleh lebih dari unit organisasi yang bekerja secara independen

2. Sistem otorisasi

- a. Anggaran investasi diotorisasi oleh RUPS
- b. Surat permintaan otorisasi investasi, otorisasi reparasi, penghentian pemakaian aset tetap, dan permintaan transfer aset tetap diotorisasi oleh direktur yang bersangkutan dan direktur utama
- c. Surat perintah kerja diotorisasi oleh kepala departemen yang bersangkutan
- d. Surat order pembelian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang
- e. Laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan
- f. Bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi
- g. Bukti memorial diotorisasi oleh kepala fungsi akuntansi

3. Prosedur pencatatan

Perubahan kartu aset tetap harus didasarkan pada bukti kas keluar, atau bukti memorial, atau surat permintaan transfer aset tetap yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap, yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang.

4. Praktik yang sehat

- a. Secara periodik dilakukan pencocokan fisik aset tetap dengan kartu aset tetap
- b. Penggunaan anggaran investasi sebagai alat pengendalian investasi dalam aset tetap
- c. Penutupan asuransi aset tetap terhadap kerugian
- d. Kebijakan akuntansi tentang pemisahan pengeluaran modal dengan pengeluaran pendapatan